



SUB BAGIAN HUMAS DAN TU KALAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 54. Padang 25137 Tlp. 0751-40818 Fax 0751-40811.40817

Koran		Hlm
Haluan		
Padang Ekspres		
Singgalang	✓	16
Posmetro		
.....		

Tahun: 2017			
Bulan:			
Jan		Jul	
Feb		Agust	
Maret		Sep	
April		Okt	
Mei		Nov	
Jun	✓	Des	

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

Pessel Raih WTP Berkat Kerja Tim

Painan, Singgalang

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pessel, Suhendri mengungkapkan, keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk keempat kalinya berkat kerja tim, bukan kerja satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja.

"Saya tentu berterima kasih pada segenap kawan-kawan OPD yang turut membantu penyajian laporan yang baik dan kredibel selama ini," ucap Suhendri kemarin di Pai-

nan.

Lebih lanjut mantan Kabid Akuntansi pada DP KAD itu mengaku, tanpa keterlibatan semua pihak, BPKD yang dipimpinnya tidak mungkin bekerja sendiri.

"Tak mungkin tanpa peran yang lain, kami dapat bekerja menyusun data dan laporan keuangan secara akurat, akuntabel dan kredibel untuk disampaikan kepada BPK," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, Pessel mendapat opini WTP atas LKPD tahun 2016

sesuai dengan LHP yang diserahkan BPK Perwakilan Sumbar kepada Bupati Hendrajoni.

"Saya mengapresiasi Pessel yang mampu mempertahankan WTP. Keberhasilan Pessel mempertahankan WTP keempat kalinya merupakan komitmen serius pemerintah setempat dalam menyajikan laporan keuangan yang berbasis aktual. Kami berharap kedepan terus dilakukan pembenahan sehingga makin baik dan sempurna," kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Eliza saat menyerahkan penghargaan WTP baru-baru ini.

Sementara Bupati Pessel, Hendrajoni menyatakan, keberhasilan Pessel meraih opini WTP yang keempat kalinya merupakan kerja seluruh OPD dan stakeholder yang terus berbenah. "Komitmen kita membangun Pessel yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera akan terwujud," ujarnya.

WTP merupakan opini tertinggi diberikan oleh BPK yang melakukan pemeriksaan atas sajian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), katanya. (214)